

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan aset, biaya, dan pendapatan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban di dalam sebuah perusahaan. Tujuannya agar dipilih orang atau kelompok orang yang mampu bertanggungjawab atas penyimpangan aset, biaya, dan pendapatan yang dianggarkan. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat memberikan wewenang dan tanggung jawab ke tingkat atasan dan di bawahnya dengan lebih efektif tanpa harus memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan. Didalam perusahaan akuntansi pertanggungjawaban juga perlu dievaluasi agar berlangsung dengan baik sehingga manajemen dapat dengan mudah menghubungkan biaya yang timbul dengan manajer pusat pertanggungjawaban yang bertanggungjawab. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai mampu mendorong perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan salah satunya adalah memperoleh keuntungan untuk mencapai tujuan tersebut yakni dengan pengendalian biaya (Abdullah, 2015).

Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat dijalankan dengan cara menyelenggarakan perencanaan suatu sistem pencatatan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar,

tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari organisasi itu sendiri. Pengendalian biaya adalah perlakuan membandingkan kinerja standar dengan kinerja aktual, analisa dari selisih-selisih yang terjadi untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mampu dikendalikan dan keputusan pengambilan tindakan untuk berbenah atau menyesuaikan perencanaan dan pengendalian dimasa mendatang agar tidak terjadi penyimpangan dan selisih antara realisasinya dan anggaran (Sufrin, 2017).

Selisih anggaran yang terjadi antara realisasi dengan anggaran yang seharusnya ada yang menguntungkan organisasi (*favourable*) dan ada yang merugikan (*unfavourable*) menurut Valentina (2010) Dalam menentukan *favourable* dan *unfavourable* terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendapatan dan biaya. Dari segi pendapatan, apabila anggaran lebih kecil dari realisasi maka selisih anggaran yang terjadi menguntungkan atau *favourable*. Sedangkan apabila anggaran yang ditetapkan lebih besar dari realisasi maka selisih anggaran tersebut merugikan atau *unfavourable*. Namun hal tersebut akan berbeda pada sisi biaya. Jika realisasi lebih besar dari anggaran maka selisih anggarannya merugikan atau *unfavourable*. Sedangkan apabila anggaran lebih besar dari realisasi maka selisih anggaran tersebut menguntungkan atau *favourable* menurut Sufrin (2017).

Sistem pencatatan tersebut akan menghasilkan laporan-laporan biaya yang menunjukkan bagaimana manajer memenuhi tanggungjawabnya atas biaya-biaya yang terjadi dalam unit perusahaannya. Dalam pengelolaan perusahaan, anggaran

merupakan bagian yang sangat penting. Anggaran dapat memberikan aspek motivasi bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran sering dipakai untuk menilai kinerja dari pimpinan pusat pertanggungjawaban menurut stefanly dan victorina (2015). Untuk memudahkan dalam sistem pencatatan maka suatu organisasi tersebut harus menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Adanya akuntansi pertanggungjawaban pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab ke tingkat pimpinan di bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan (Fowzia, 2011). Adanya pendelegasian tugas dan wewenang ini akan menimbulkan berbagai tingkat tanggung jawab dan wewenang dalam sebuah organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban juga perlu dievaluasi agar berlangsung dengan baik sehingga manajemen dapat dengan mudah menghubungkan biaya yang timbul dengan manajer pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangat perlu menerapkan sebuah akuntansi pertanggungjawaban yang menjadi suatu sistem untuk mengendalikan tanggung jawab di tiap-tiap unit kerja atau departemen. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai mampu mendorong perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan (Fadillah, 2017).

Akuntansi pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah suatu sistem yang membandingkan antara rencana anggaran dengan realisasinya dari setiap pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja seseorang atau manajemen untuk mencapai tujuan dari organisasi/perusahaan. Informasi akuntansi pertanggung jawaban sangat berguna dalam pengendalian manajemen sebagai sarana untuk

komunikasi, motivasi, dan penilaian. Manajemen bertanggungjawab yakni untuk mencapai tujuan dari organisasi/perusahaan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sangat berguna dalam pengendalian manajemen sebagai sarana untuk komunikasi, motivasi, dan penilaian. Manajemen bertanggungjawab yakni untuk memastikan bahwa pekerjaan itu telah dilaksanakan, maka informasi akuntansi membantu dalam pengendalian biaya (Sufrin, 2017). Kaitan antara akuntansi pertanggungjawaban dengan pengendalian biaya terletak pada fungsi pengendalian yakni faktor manusia. Hal ini disebabkan karena manusia adalah subjek yang melakukan aktivitas-aktivitas organisasi sekaligus pemegang peran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pengendalian biaya suatu organisasi yang ada di kota maupun di berbagai Negara menurut Jarkoni (2010).

Salah satu contoh dari Negara yakni Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis usaha sehingga perlu mengembangkan berbagai jenis usaha yang kecil dan menengah untuk menunjang aktivitas perekonomian. Dalam menunjang hal tersebut maka banyak hal dimanfaatkan untuk mendirikan berbagai jenis usaha, yang di programkan oleh pemerintah maupun masyarakat yaitu mulai dari usaha BUMN, PT, maupun CV dan toko-toko kecil mendistribusikan barang dan melayani jasa. Menanggapi kebutuhan akan usaha, maka banyak bermunculan pengusaha yang berdiri bersama dengan koperasi (Abdullah, 2015).

Menurut Rudianto (2010:3) definisi dari koperasi merupakan suatu lembaga yang mengatur bersama pemanfaatan dan penggunaan sumber daya ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi demi

meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Rudianto (2010:3) juga menjelaskan secara umum bahwa koperasi dipahami sebagai organisasi orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kualitas kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Koperasi terdapat beberapa macam jenis salah satunya adalah koperasi unit desa yang kemudian disingkat menjadi KUD. KUD adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu Koperasi Unit Desa secara resmi didukung perkembangannya oleh pemerintah. Adapun dasar dalam pembentukan KUD ini yaitu unit usaha yang tergolong kecil dan susunan personilnya masih sederhana, wewenang dan tanggungjawabnya masih kecil.

Setiap koperasi berusaha menempatkan diri menjadi yang terbaik untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memberikan layanan yang terbaik. Oleh karena itu tingkat persaingan yang ketat pun tidak dapat dihindarkan demi mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan begitu pula dengan KUD Sri Tanjung, yang memiliki peran penting untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Kesulitan lain yang dihadapi berkaitan dengan meningkatnya biaya operasi secara tajam menyusul banyaknya KUD yang bergerak dibidang yang sama yang mengakibatkan persaingan yang tercipta antara KUD yang satu dengan yang lain dengan persaingan usaha semakin

ketat. Dengan keterbatasan pada sisi tersebut, usaha yang ada dilakukan untuk peningkatan efektivitas di segala bidang, serta peningkatan pengendalian untuk mengelola sisi biaya secara optimal.

Pengendalian perlu dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan, salah satunya pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan agar dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya. Selain itu perusahaan juga perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban guna menunjang pengendalian biaya. Semakin baik penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada badan usaha atau perusahaan maka akan semakin baik pula pengendalian biaya, sedangkan pengendalian biaya yang cukup baik akan mempermudah penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam organisasi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai (Stefany, 2015). Misalnya organisasi yang terdapat di desa yang biasa disebut koperasi unit desa.

Koperasi unit desa sebagai salah satu contoh yakni KUD sri tanjung. KUD Sri tanjung merupakan koperasi unit desa yang berada di desa krai kecamatan yosowilangun. Kud sri tanjung tidak hanya ada di krai melainkan juga ada di beberapa desa lainnya seperti di Wotgalih, Darungan, Munder, Karanganyar, Karangrejo Dan Keraton. Kud sri tanjung memiliki beberapa unit usaha diantaranya yakni unit usaha angkutan, unit usaha tebu rakyat, unit simpan pinjam, unit usaha pembayaran listrik dan telepon, unit usaha saprotan(pupuk), unit usaha waserda (grosir toko peracangan), unit usaha RMU (penggilingan padi), unit usaha pengadaan pangan (penjualan beras dan jagung), unit aneka usaha, unit kredit usaha tani, unit UPLJA (jasa alsintal/alat mesin pertanian). Dari

beberapa unit usaha diatas pimpinan kud sri tanjung tidak mungkin untuk mengawasi semua kegiatan sendiri dan secara langsung, oleh karena itu kud sri tanjung harus melakukan proses pengendalian biaya agar semua kegiatan dan anggaran dapat terealisasi dengan baik .

Manajemen KUD dalam melakukan proses pengendalian biaya, harus melakukan perbandingan secara terus-menerus terkait biaya yang terjadi antara perencanaan dan pelaksanaan. Dari hasil membandingkan antara program atau anggaran yang telah disusun, manajemen akan dapat melakukan penilaian atas suatu efisiensi usaha pada organisasi tersebut (Mandak, 2013). Menurut Sari (2018) berhasil atau tidaknya organisasi sangat berpengaruh terhadap anggotanya, sehingga dituntut untuk lebih maksimal dalam mengelolanya, khususnya dalam segi keuangan yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangannya. Melalui laporan keuangan dapat diketahui sejauh mana potensi prestasi dan kondisi keuangan yang dimiliki organisasi tersebut. Maka dari itu dalam pengembangan organisasi diperlukan adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam membantu mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab yang ada.

Pentingnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban guna mendapatkan informasi, khususnya informasi mengenai pengendalian biaya. Dalam akuntansi pertanggungjawaban untuk melakukan pengendalian biaya dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan suatu anggaran dalam sistem pencatatan biaya yang dapat dikendalikan. Dari pencatatan biaya-biaya tersebut akan menghasilkan laporan biaya yang dapat menunjukkan kinerja manajer dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pada biaya-biaya yang terjadi didalam unit usahanya Agar

manfaat akuntansi pertanggungjawaban tercapai harus disusun anggaran untuk tiap-tiap unit organisasi melalui pembentukan pusat pertanggungjawaban guna menilai kinerja dari pusat pertanggungjawaban (Sari, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut terlihat betapa pentingnya menerapkan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan ataupun pada suatu organisasi maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Kud Sri Tanjung”.

1.2 Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yakni akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya pada KUD Sri Tanjung. Data yang akan diteliti adalah data laporan tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan proses pengendalian biaya pada KUD Sri Tanjung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan proses pengendalian biaya pada KUD Sri Tanjung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi KUD Sri Tanjung, sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban.
2. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa yang dimaksud akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya.
3. Bagi pihak yang berkaitan, penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan maupun mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya

